

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat individu maupun kelompok memiliki berbagai agama, ras, bahasa dan etnis dapat dilihat keberagaman dari masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara multikultural yang memiliki kehidupan yang berbeda dalam menciptakan harmonisasi yang beragam kultur. Memiliki wilayah yang terpisah-pisah Indonesia menunjukkan bahwa masyarakatnya mampu menjaga keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan yang menjadi pedoman hidup bangsa tercantum dalam Pancasila sila ketiga dan Indonesia juga terkenal sebagai negara multi Etnis.

Etnisitas di definisikan sebagai identitas etnis yang dimiliki individu ataupun kelompok secara simbolik untuk menghasilkan pembeda antar kelompok lainnya. Identitas di kategorikan setiap kelompok berdasarkan kebudayaan, ras, agama, hubungan keluarga, dan asal daerah yang menjelaskan sedikit bahwa identitas etnis atas dasar pengalaman dan kesejahteraan. Banyak etnis tionghoa yang tinggal di Indonesia, namun terlihat cukup baik dalam pembaharuan di masyarakat, sekitar 1,45%-2,04% jumlah penduduk Tionghoa naik setiap tahunnya di Indonesia.

Suasana demokrasi sejak reformasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga Tionghoa untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih dan ikut terjun langsung di kancah politik. Etnis Tionghoa merupakan etnis yang mendapat perhatian khusus mendapat perhatian dari pemerintah. Prinsip dagang yang mereka terapkan adalah mengedepankan efisien dan rasa saling percaya yang dapat membangun hubungan yang baik. Terkadang dalam bidang ekonomi pihak penguasa memanfaatkan etnis Tionghoa untuk mempertahankan kekuasaan dengan ciri khas nya. Sejak saat itulah etnis Tionghoa menjadi polemik dalam usaha pembaharuan bangsa indonesia dan masih dianggap etnis pendatang yang harus memaksa akan asimilasi untuk proses naturaisasi.

Etnis Tionghoa memanfaatkan kebebasan berdemokrasi dengan membentuk organisasi partai politik etnis Tionghoa atau organisasi kalangan keluarga, marga, agama tionghoa dan masih banyak lainnya. Masih ada sebagian dari mereka cenderung bergabung dengan partai pribumi yang cukup besar dikenal yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), belakangan dikenal sebagai Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa.

Identitas politik masyarakat etnis Tionghoa sudah ada pada pemerintahan kolonian belanda dengan melalui organisasi Tionghoa bernama Sun Yat Sen bertujuan menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang

pendidikan, hukum / peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal.

Etnis Tionghoa adalah salah satu kelompok Etnis yang terbesar kedua setelah Etnis melayu yang ada di Indonesia. Jumlah Etnis Tionghoa ini sekitar 1,5% sampai 2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Etnis Tionghoa bisa bertahan di Indonesia hingga saat ini, walaupun mereka banyak terusik dari kehidupan sehari-hari. Sekarang etnis Tionghoa mempunyai sebutan tersendiri, yaitu orang Indonesia Tionghoa. Istilah ini digunakan untuk warga negara Indonesia yang memiliki keturunan Tionghoa. Sebelumnya Orang Tionghoa sedikit menutup diri dan sangat berhati-hati dalam pergaulan sosial politik lokal dan sekarang menjadi lebih terbuka. Mereka tampak semakin berani untuk terlibat aktif di arena politik praktis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Umumnya etnis Tionghoa sudah banyak tersebar di Indonesia khususnya di Kota Singkawang yang setiap tahunnya meningkat dan sudah menjadi mayoritas. Masyarakat banyak beranggapan bahwa masyarakat Tionghoa lebih berperan di dalam bidang perdagangan. Pendapat adanya masyarakat etnis tionghoa mendominasi bidang perdagangan merupakan kelompok terbesar. Namun, salah satu hal yang penting tidak bisa dipungkiri adalah etnis Tionghoa Kota Singkawang sebagian besar mayoritas pedagang dan perpolitikan. Komposisi penduduk relatif sama dengan kabupaten maupun kota lain yang rawan konflik etnis, namun di Kota Singkawang tidak pernah terjadi konflik etnis. Kondisi

sosial dan karakter budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial antar etnis yang terjadi di Kota Singkawang dan integrasi politik di Kota Singkawang menggunakan cara persuasif melalui media Hari Besar Nasional.

Kota Singkawang etnis Tionghoa sudah memulai pergerakan politik berlandaskan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa demokrasi merupakan acuan dalam mengembangkan bentuk pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945,“ Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negera Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Dengan pernyataan di atas menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik, bukan kerajaan atau aristokrasi, dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian budaya politik masyarakat menjadi sesuatu yang sangat darurat, mengingat masyarakat sebagai pemegang kuasa penuh atas demokrasi.

Etnis Tionghoa membangun kembali tiga pilar budaya yaitu media, pendidikan dan organisasi. Dalam media cetak seperti surat kabar yang memuat berita dan peristiwa seputar tentang Indonesia maupun mancanegara dan bahasa yang digunakan adalah bahasa mandarin, serta perkembangan baik tingkat Nasional maupun internasional bahasa yang di pakai adalah mandarin. Untuk bidang pendidikan sendiri, banyak sekolah swasta yang mengkhususkan etnis tionghoa dan etnis tionghoa terkenal cerdas dalam sains juga organisasi serta komunitas yang menandai

keberadaan mereka tersebar di wilayah Indonesia khususnya Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Didalam buku *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*, La Ode, M.D. (2012: 113) mengatakan bahwa ada tiga faktor ambisius pendorong Tionghoa terlibat dalam politik yaitu *Idealisme*, *pragmatisme* dan *kekuasaan*. Faktor dorongan *Idealisme* warga kelompok Tionghoa untuk terlibat kedalam politik tidak terlepas dari faktor pandangan bangsa Tionghoa yang kerap bersifat *dualisme*, Yaitu di satu sisi cara hidup yang maju dan modern seperti yang dicapai oleh bangsa Barat, yakni kemajuan teknologi tinggi yang diikuti dan ditiru, sedangkan di satu sisi tetap mempertahankan cara hidup tradisionalisme Cina yang berdasarkan konfusianisme yang dianggap melahirkan kearifan sebagai orang Timur yang lebih baik dari bangsa mana pun di dunia.

Faktor dorongan *pragmatisme* yang antara lain bertujuan menyelamatkan dan mengamankan aset yang telah diperoleh selama era Orde Baru dimana ada peristiwa yang terjadi pada kalangan kelompok Tionghoa tidak memiliki politisi yang dapat memperjuangkan aspirasi kelompok Tionghoa.

Faktor dorongan *Kekuasaan*, ini salah satu faktor yang paling kuat karena selama ini kelompok Tionghoa sangat dibatasi untuk terlibat dalam politisi. Dengan Demikian, Kelompok Tionghoa praktis hanya mengalami

perasaan dikuasi oleh kelompok etnis lain yang juga sesama warga negara Indonesia

Pada tahun 2007 Kota Singkawang menggelar pilkada langsung yang pertama untuk periode 2007-2012. Pasangan Hasan Karman dan Edy R. Yacoub yang diusung Partai Indonesia Baru (PIB) dan Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat 36.706 suara atau 41,8% dan tampil sebagai pemenang. Pasangan Hasan Karman dan Edy R. Yacoub mengalahkan pasangan lainnya yang ikut dalam pilkada 2007.

Hasan Karman merupakan walikota pertama dari kelompok Tionghoa. Keterpilihannya memberikan kebanggaan tersendiri bagi kelompok Tionghoa. Keaktifannya di Dewan Pimpinan Pusat PIB dan kemampuannya melakukan Konsolidasi di tingkat lokal berikut kecerdikannya memainkan isu soal kelompok Tionghoa yang selama bertahun-tahun selalu mendapat perlakuan diskriminatif membuat Hasan Karman mendapatkan dukungan yang sangat besar, terutama dari kalangan Tionghoa.

Akan tetapi dalam dua tahun kepemimpinannya, Hasan Karman mulai di Kritik dari berbagai kalangan di Kota Singkawang, termasuk dari kelompok Tionghoa. Hal tersebut dipicu oleh perilaku politik dan pola kebijakan Hasan Karman yang dinilai kurang mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat Kota Singkawang. Beberapa kebijakan Hasan Karman dinilai kontroversial pertama, Hasan Karman dengan sesukanya sering menggeser pejabat birokrasi dengan menggantikan pejabat baru dari

kelompok Tiongoa dan nonmuslim walaupun pihak yang digantikan belum memenuhi syarat kepangkatan dan golongan.

Kedua, Hasan Karman cenderung tunduk kepada kelompok pengusaha tertentu di Jakarta sehingga kebijakannya disinyalir lebih dimainkan oleh kelompok pengusaha tersebut. Semakin banyak pengusaha Jakarta yang dibawa Hasan untuk membeli tanah di Singkawang, terutama lahan produktif milik petani, dinilai memberikan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat Singkawang. Para petani, yang sebelumnya menikmati segala kebutuhan hidupnya dari hasil bertani, sekarang banyak yang menganggur. Semua kelurahan di Singkawang cukup banyak petani yang tergoda untuk menjual lahan pertaniannya dan akhirnya para petani mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan di luar kegiatan bertani.

Ketiga, Hasan Karman terlalu menonjolkan simbol ketionghoan tanpa mempertimbangkan perasaan dan sentimen etnis lain. Hal itu tampak dari kenekatan Hasan meniru mendirikan Monumen Naga di perempatan yang ramai dan sempit di tengah Kota Singkawang. Bukan hanya dari kalangan Melayu, Madura, dan Jawa yang menentang akan hal itu, akan tetapi kelompok dari Tionghoa sendiri juga kurang menyambut gembira pendirian Monumen Naga tersebut dikarenakan, masyarakat Kota Singkawang ingin sekali hidup Harmonis tanpa diganggu oleh hal-hal yang mengatasnamakan etnis untuk membuat keributan sosial. Masyarakat Kota Singkawang tidak menginginkan tragedi yang pernah terjadi di

Sampit, Palangkaraya dan daerah lainnya menjadi basis pertenggaran etnis dan agama.

Pada tahun 2017 Warga Tionghoa berpotensi untuk mendominasi dalam partai politik untuk menjadi calon anggota legislator DPR, DPRD tingkat Kota. Yang berhasil menjadi anggota legislator pada tahun 2014 - 2019 pada tingkat kota sebanyak 8 orang dan menjadi 7 orang karena Tjhai Chui Mie, S.E. megundurkan diri dari anggota DPRD Kota Singkawang untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota. Selama kampanye pemilu hampir semua partai politik di Kalbar khususnya pada Kota Singkawang menggunakan tulisan Mandarin pada stiker, spanduk, dan pamflet sebagai sarana untuk merebut simpati pemilih. Bahkan, apabila digelar kampanye, semua lapisan masyarakat Tionghoa turun ke jalan bergabung bersama masyarakat lainnya untuk pawai. Fakta yang jarang dijumpai selama Orde Baru ini benar-benar membuktikan bahwa Kalimantan Barat memang tidak mengenal diskriminasi ras, khususnya dengan Tionghoa.

Untuk menentukan identitas politik masyarakat yang berasal keturunan Tionghoa mulai terlihat dalam berbagai peristiwa politik yang ada terutama pada pemilukada. Latar Belakang keterlibatan Etnis Tionghoa dalam politik khususnya dalam pemilukada di Indonesia terutama di Kota Singkawang bisa dikatakan tidak terlepas dari sejarah, kelompok dan komunitas Etnis Tionghoa yang ada di Kota Singkawang terus menunjukkan eksistensinya dalam multietnis yang ada di kota ini.



Identitas politik itu sendiri merupakan arah gerak dalam menentukan pilihan di pemilukada, konsep tentang identitas politik banyak berhubungan dengan budaya politik, sebagaimana Austin Ranney menyebutkan defenisi budaya politik adalah pola orientasi terhadap objek - objek politik. Pada prinsipnya identitas politik dari suatu kelompok atau organisasai masyarakat tertentu adalah pengembangan prinsip - prinsip budaya politik di masyarakat luas, identitas ini untuk menjaring dukungan dari berbagai pihak.

Adanya reformasi dan diselenggarakannya pemilihan Walikota secara langsung pada era demokrasi dan otonomi daerah, seakan membuka peluang bagi etnis Tionghoa untuk menentukan pilihan pada kelompok etnis mereka sendiri. Dalam hal ini, terpilihnya Tjhai Chui Mie sebagai Walikota perempuan pertama Tionghoa, secara terang menunjukkan adanya identitas politik. Dilihat dari fenomena sebelumnya adanya pergantian etnis dalam memimpin Kota Singkawang yaitu terpilihnya Etnis Melayu dan pada tahun yang akan datang terpilihnya Etnis Tionghoa, hal ini selalu terjadi pergantian etnis dalam memimpin Kota Singkawang hingga sekarang.

Dalam pemilukada Kota Singkawang Tahun 2017, sangat terlihat partisipasi etnis Tionghoa dalam mencoblos maupun mencalonkan sebagai wakil ataupun walikota. Antuisme masyarakat khususnya Etnis Tionghoa setiap tahun semakin meningkat. Dalam pemerintahan Soeharto etnis Tionghoa harus mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia.

Namun pada kenyataannya di Kota Singkawang, masih banyak etnis Tionghoa bahkan calon wakil/walikota masih menggunakan nama asli Tionghoa dan masyarakat Kota Singkawang tidak mempermasalahkan hal itu.

Pemilukada Kota Singkawang yang sudah terlaksana pada februari 2017 terlihat pada calon walikota Tjhai Chui Mie memperoleh banyak suara yaitu 38.549 suara dan mengalahkan pasangan calon walikota yang lainnya. Tetapi, dengan melihat perolehan suara dari pasangan Tjhai Chui Mie, SE dan Drs. H. Irwan, M.Si maka terlihat perolehan yang dominan. Hal ini muncul pertanyaan tentang pasangan ini dalam memanfaatkan isu politik identitas dalam pemilukada 2017 di Kota Singkawang.

Pengguna Politik Identitas yang terjadi di Kota Singkawang pada waktu pemilukada, kampanye dan penggalangan masa bisa merusak harmonisasi sosial serta membuat masyarakat terpecah belah. Hal ini terjadi saat menjelang pemilukada Walikota Kota Singkawang, Vihara Budi Dharma di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mendapat serangan bom molotov. Walaupun tidak ada korban, kepolisian Kota Singkawang menemukan alat bukti berupa botol kaca seukuran minuman suplemen kesehatan, sumbu, dan sisa cairan minyak tanah. Pelaku berjumlah dua orang dengan menggunakan sepeda motor. Situasi menjelang pemilukada inilah yang sangat dimanfaatkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan melihat dinamika dan pemahaman dari etnis Tionghoa dalam tiap peristiwa maupun proses

politik, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “ **POLITIK IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILUKADA DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017** ”. Penulis memfokuskan pada masyarakat Etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Singkawang.

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan melihat luasnya wilayah penelitian ini, maka penulis membatasi kajian penelitian politik identitas Etnis Tionghoa dalam pemilukada di Kota Singkawang. Dengan itu penulis merumuskan masalah yang perlu mendapat penjelasan sebagai berikut;

1. Apa Faktor-Faktor yang Mendorong Politik Identitas Etnis Tionghoa Terjadi Dalam Pemilukada Di Kota Singkawang Tahun 2017?
2. Bagaimana Politik Identitas Etnis Tionghoa Digunakan Dalam Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2017 ?

## **C. Tujuan**

Untuk mendapatkan pemahaman tentang Faktor-faktor yang mendorong dan penggunaan politik identitas Etnis Tionghoa Dalam Pemilukada Di Kota Singkawang Tahun 2017, adapun tujuan dibawah ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mendorong Politik Identitas Etnis Tionghoa Terjadi Dalam Pemilukada Di Kota Singkawang Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana Politik Identitas Etnis Tionghoa Digunakan Dalam Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2017?

#### **D. Manfaat**

##### **1. Teoritik**

Untuk menambah kajian pengetahuan tentang Politik Identitas Etnis Tionghoa Dalam Pemilukada Di Kota Singkawang.

##### **2. Praktisi**

Sebagai acuan ataupun cara pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi Politik Identitas Etnis Tionghoa Dalam Pemilukada Di Kota Singkawang.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Politik Identitas**

Dewasa ini dalam perkembangannya politik identitas banyak menampilkan diri dalam wacana politik kebudayaan. Dalam kajian ilmu politik yang menjadi konsep baru dari politik identitas. Biopolitik dan politik perbedaan adalah salah satu nama lain dari politik identitas yang mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang muncul dari perbedaan

tubuh. Menurut Buchari (2014 : 19) mengatakan politik identitas secara teoritis merupakan suatu sifat hidup yang ada didalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya yang melekat di masyarakat setempat dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu hubungan interaksi.

Politik identitas juga merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan. Berdasarkan nasib perasaan tersebut, maka bangkitlah dengan menunjukkan identitas atau jati diri dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan manipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.

Heller maupun Morowitz (dalam muhtar, 2012: 23) memperlihatkan tujuan yang sama yaitu politik identitas yang dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di selenggarakan di Wina pada 1994. Dalam pertemuan di Wina adalah lahirnya dasar-dasar praktik politik identitas.

Klaus Von Beyme dalam Abdillah (2002 : 14 ) mengatakan ada tiga karakteristik pada politik identitas, yaitu; Gerakan politik identitas ini intinya adalah membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya ditolak dan membangun suatu teori untuk mengendalikan faktor sebagai penyusun perbedaan yang mendasar sebagai kenyataan hidup, dalam gerakan politik identitas ada suatu pondasi yang untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat dicapai dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar.

Menurut Mahdalena (2012: 2) tindakan politis yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari suatu kumpulan dengan alasan memiliki kesamaan identitas atau ciri khas baik pada ras, etnisitas, jenis kelamin atau keagamaan merupakan maksud dari politik identitas. Respon munculnya politik identitas terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang sering diterapkan secara tidak adil. Terlebih kehadiran politik identitas dikatakan secara konkret sengaja dijalankan di perkumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Serta kebebasan untuk berkeyakinan masyarakat selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan ini merupakan hak-hak politik.

Menurut Kristianus dalam Buchari (2014 : 20) mengemukakan bahwa dalam perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama adalah bagian dari politik identitas. Perjuangan dalam politik identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-

orang pinggiran, baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Abadillah (2002: 2) mengatakan bahwa politik identitas adalah politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi - asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat masalah Jenis kelamin, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasar berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan - persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa.

Castel dalam Buchari (2014: 16) mengatakan bahwa, politik identitas adalah sebuah partisipasi individu dan lebih ditentukan oleh budaya psikologis seseorang. Jika proses pembentukannya dalam kondisi tertekan (Identitas resisten) dengan adanya dominasi pihak lain, maka akan muncul identitas yang peristilahan Calhoun dalam Buchari (2014: 16) disebut politik identitas. Menurut David Brown dalam Subiyanto (Buchari, 2014: 16) menjelaskan bahwa identitas kelompok menunjang konstruksi sosial untuk mempromosikan keterwakilan kelompoknya dan untuk pada suatu momen tertentu dapat dibangkitkan demi kepentingan kelompoknya.

Menurut La Ode ( 2012: 221) mengatakan ada tiga faktor pendorong Tionghoa terlibat dalam Politik yaitu ; 1) faktor idealisme yang beryakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya dan kebiasaan dan tumbuh secara perlahan dalam jiwa personal

dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide ataupun cara berfikir. 2) faktor Pragmatisme yang merupakan sikap untuk menanggapi suatu fenomena yang sedang terjadi dengan cepat yang berkaitan dengan ketidaknyamanan jasmani dan rohani yang sangat diperlukan untuk dilakukan dengan cepat dan tepat dan 3) Kekuasaan sebagai pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku memengaruhi pihak lain sesuai dengan keinginannya dan penggunaan sejumlah sumber kekuasaan dari agama, kepandaian, kedudukan, kekayaan, kepercayaan dan keterampilan untuk memperoleh kepatuhan dari pihak lain.

Klaus Von Beyme (dalam Abdillah dalam Sandhi, 2014: 31) mengatakan ada tiga karakteristik yang terdapat pada politik Identitas yaitu; 1) Gerakan politik identitas yang pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” dengan prinsip yang mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusunan perbedaan-perbedaan; 2) Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Dimana ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembangian kekuasaan tidak tercapai sebagian tujuan gerakan, pemisah dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; 3) Upaya untuk menciptakan kelompok khusus merupakan kelemahan dari gerakan politik identitas. Sebagai contoh, dalam kontekstasi pada pilkada DKI terjadi sentimen politik identitas yang sangat kuat, dimana pribumi mengkhhususkan diri dan menolak non pribumi, hal ini terkait dengan ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan



dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain.

### **3. Etnis Tionghoa**

Menurut Frederich Barth dalam Andrian (2012: 28) mengatakan bahwa etnis menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan, ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori terikat pada sistem nilai budaya. Lalu John M. Echols dalam Adrian (2012: 28) mengatakan suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Etnis biasanya dikaitkan dengan isu minoritas dan hubungan kekuasaan, hal tersebut berkembang dengan kecenderungan membicarakannya dalam konteks sebuah unit sub-nasional Ardiansyah dalam Rahman (2016).

Horowitz dalam Ardiansyah dalam Rahman (2016) mengatakan terminologi etnis berkaitan erat dengan kelahiran dan darah, walaupun tidak selalu demikian. “keaslian” individu sangat diperhitungkan, tetapi tidak menutup adanya perkecualian. Identitas etnis realtif sulit untuk diubah, walaupun bisa terjadi. Oleh karenanya, identitas etnis adalah berdasarkan persamaan darah (kelahiran) bagi sebagian besar anggotanya.

Horowitz dalam Ardiansyah dalam Rahman (2016) dalam konteks sosiologi, etnis adalah sesuatu yang ditentukan atau *ascribed status*. Namun demikian, beberapa variasi tetap dapat dihadirkan karena etnis juga

mengacu pada kesamaan kepercayaan. Dengan memperhitungan adanya disparitas antara ciri-ciri fisik dan konsepsi kelompok maka pengertian etnisitas menjadi elastis

Etnis Tionghoa menurut Purcell (dalam Liem, 2000: 20) bahwa Etnis Tionghoa adalah individu yang melihat dirinya sebagai “Tionghoa” atau dianggap seperti itu oleh lingkungannya sendiri. Seluruh imigran Negara Tiongkok dan keturunannya yang tinggal dalam ruang lingkup budaya Indonesia dan tidak tergantung dari kewarganegaraan imigran berasal dan bahasa yang digunakan.

Menurut Liem (2000: 20) sejak generasi pertama dan kedua yang telah tinggal di Negara Indonesia serta berbaur dengan penduduk setempat sehingga menguasai satu atau lebih bahasa yang dipakai di Indonesia merupakan Etnis Tionghoa di Indonesia yaitu orang Indonesia yang berasal dari negara Tiongkok. Sedangkan menurut Suryadinata (1981) mengatakan istilah Tionghoa yang tinggal di Negara Indonesia digunakan pada Etnis Tionghoa yang memiliki nama keluarga (marga), tanpa memandang kewarganegaraannya.

#### **4. Pemilukada**

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia diawali dengan orde baru yang otoriter berubah menjadi sistem politik demokratis. Terlebih lagi dengan revisinya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan (perubahan ketiga menjadi

UU No. 12 Tahun 2008), khususnya yang mengatur tentang sistem pemilihan kepala daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi sistem pemilihan langsung oleh masyarakat di daerah.

Menurut Simamora (2011) menjelaskan pemilihan umum adalah sarana sekaligus instrumen yang terpenting untuk demokratis perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang kekuasaan. Dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di tanah air adalah bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang saat ini dilakukan secara langsung di Indonesia adalah salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi yang telah digariskan dalam konstitusi. Secara teoritik, pemilu adalah kompetisi politik di tengah masyarakat. Tetapi, pemilu telah menampilkan politik kepartaian menurut versi sendiri Nuryanti (2016).

#### **4.1 Fungsi Pemilu**

Pemilihan Umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilu tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan cakupan

nasional, pemilu merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah :

- a. Sebagai sarana legitimasi politik fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintahan dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan dan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Gisberg dalam Simamora (2011) mengatakan fungsi legitimasi politik merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Ada tiga alasan pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat meyakinkan atau mempengaruhi kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula

mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya.

b. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang di hasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah. Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau nomelit yang menggunakan jalur institusi politik dan

organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitannya, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi penguasa. Dengan begitu di harapan selama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

#### **4.2 Tahapan Pemilukada**

Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai pemilukada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Pemilukada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 ayat 1. Selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah :

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah

## **F. Definisi Konseptual**

Menurut Koesnaedi dalam Hakim (2014) mengatakan bahwa definisi konseptual yaitu suatu metode untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dan konsep yang lain. Sedangkan konsep adalah abstraksi dari suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual dalam tulisan ini adalah;

### **1. Politik Identitas**

Politik identitas adalah politik perbedaan yang dibentuk atas dasar tekanan ketidakadilan politik yang dirasakan dan memiliki pada kelompok tertentu dengan pola pikir kultur (tradisional) kedaerahan untuk melihat atau memperhatikan politik sebagai bentuk partisipasi yang akan menjadi sebuah kekuatan politik.

### **3. Etnis Tionghoa**

Etnis Tionghoa adalah seluruh imigran negara Tiongkok dan keturunannya yang tinggal dalam ruang lingkup budaya Indonesia dan tidak tergantung dari kewarganegaraan mereka dan bahasa yang mereka gunakan. Etnis Tionghoa adalah individu yang memandang dirinya sebagai “Tionghoa” atau dianggap demikian oleh lingkungannya.

### **4. Pemilukada**

Pemilukada adalah pemilihan umum kepala daerah secara langsung di tingkat lokal yang melibatkan masyarakat langsung serta berfungsi untuk sarana legitimasi politik, perwakilan politik dan elit penguasa tingkat daerah.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan pengukuran suatu variabel, mencapai tujuan penelitian. Melalui definisi operasional akan ditentukan gejala dan indikator variabel dan bagaimana mengukur gejala atau indikator tersebut koesnaedi dalam hakim (2014).

Pengaruh yang di dasarkan pada Politik Identitas Etnis Tionghoa terhadap Pemilukada merupakan dasar penelitian ini. Berdasarkan kerangka teori diatas ada 2 jenis definisi operasional yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang



mendorong Politik Identitas Etnis Tionghoa dalam Pemilu Kota Singkawang Tahun 2017, yaitu ;

1. *Idealisme*, adalah keyakinan individu atas hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan.
  - 1) Keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan moral.
  - 2) Kontribusi yang nyata dalam bertindak.
2. *Pragmatisme*, adalah sesuatu yang membuktikan seseorang benar dalam menanggapi suatu fenomena yang sedang terjadi dengan lebih mementingkan sisi kepraktisan dibandingkan manfaat.
  - 1) Keputusan yang dibuat hanya untuk jangka pendek.
3. *Kekuasaan*, adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain.
  - 1) Mencapai posisi yang tinggi dalam pekerjaan.
  - 2) Ide-ide yang dimiliki dapat memenangkan persaingan.
  - 3) Memiliki karakter sebagai pemimpin.

Yang kedua untuk mengetahui penggunaan Politik Identitas Etnis Tionghoa dalam Pemilu Kota Singkawang Tahun 2017 dapat dilihat dari tiga karakteristik yang terdapat pada politik Identitas yaitu;

1. *Narasi Besar*, Perbedaan yang berkaitan dengan fakta atau rencana mendasar yang sudah dibuat namun sering menjadi wacana.
  - 1) Program yang dibuat tidak terlaksana.
  - 2) Ketidakjelasan tujuan suatu program.

- 3) Tidak ada target capaian dalam menjalankan program
2. *Apartheid terbalik*, adalah kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagian tujuan gerakan, pemisah dan pengecualian diri yang diambil sebagai jalan keluar.
    - 1) Ketidakadilan dalam pelayanan suatu program.
  3. *Kelompok Khusus*, adalah sekelompok masyarakat karena keadaan fisik, mental maupun sosial budaya dan ekonomi yang mengadakan perkumpulan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu.
    - 1) Mengistimewakan satu program dalam satu kelompok

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Teknik analisis Data**

#### **1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah sesuatu proses seseorang dalam memahami fenomenal tertentu kemudian dikembangkan menjadi ide, teori, dan konsep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci (Satrosmoro) dalam (Surta, 2016).

Jenis penelitian ini menggunakan metode dekriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan

atau menggambarkan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat (Notoatmojo, 2012).

## **2. Jenis Data**

### **2.1 Data Primer**

Data primer adalah suatu data yang dapat berupa data dokumen asli yang dikumpulkan dari situasi aktual dimana ketika peristiwa itu terjadi, oleh karena itu dinamakan data primer. Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara bersama beberapa sumber yang ditetapkan seperti pengurus KPUD Kota Singkawang, aktor politik Tionghoa, Tim sukses pasangan yang memenangkan pemilukada tahun 2017, beberapa masyarakat Tionghoa dan beberapa masyarakat Melayu.

### **2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang dapat berupa bacaan dan berbagai sumber data lainnya. Data sekunder dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari organisasi ataupun lembaga terkait selain itu juga bisa berupa lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti KPUD, hasil studi, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen KPUD Kota Singkawang yang didapat dari internet maupun secara langsung

dari buku-buku, jurnal, laporan, dan arsip yang ada kaitannya dengan penelitian.

## **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

### **2.3.1 Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari sasaran penelitian atau dengan dialog tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Wawancara dilakukan kepada pengurus atau kepala KPU, tim sukses dari pihak pemenang, aktor politik Tionghoa, masyarakat Etnis Tionghoa, Masyarakat Etnis Melayu untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan judul penelitian (Notoatmojo, 2011).

### **2.3.1 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian pustaka bisa berupa buku, arsip, artikel yang digunakan sebagai bahan penunjang dari hasil wawancara. Dokumentasi yang akan diambil dalam penelitian ini berupa laporan perolehan surat suara antar etnis, laporan perolehan surat suara antar wilayah, sarana dan prasarana untuk menyukseskan kampanye dan tim sukses dari pihak pemenang.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menjabarkan data secara berurutan dengan membuat pola atau penjelasan berdasarkan data yang sudah dikelompok – kelompokan agar memudahkan menganalisis dan memahami. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif yang dilakukan berdasarkan pemahaman yang dikaitkan kedalam fakta-fakta yang ditemukan dan informasi yang didapatkan dengan memahami masalah yang muncul dimasyarakat (Moleong, 2000).

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis terhadap data yang dinyatakan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang didapatkan dilapangan berdasarkan data dari narasumber ataupun responden secara lisan maupun tertulis bisa berupa fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi ditempat penelitian. Data tersebut berupa kutipan wawancara, file, dokumentasi dan hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian.

#### **I. Sistematika Penelitian**

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini maka akan disusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dengan adanya sistem penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dan penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum, sejarah dari objek penelitian, melihat visi dan misi daerah yang akan diteliti dan kondisi geografis dari Kota Singkawang.

## BAB III

Bab tiga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong politik identitas dan penggunaan politik identitas di Kota Singkawang dalam pemilu pada tahun 2017, menguraikan pembahasan dari penelitian dan pembahasan analisis data dari hasil penelitian.

## BAB IV

Bab empat ini adalah bab penutup yang terdiri dari dua hal yaitu, kesimpulan dan saran, didapat dari hasil penelitian sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat.